

# Perlindungan Keamanan untuk Pembangunan Berkelanjutan: Studi Tentang Debat Pemilihan Bupati di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat dari Perspektif Kebijakan Hukum

Yulia Amalia<sup>\*1</sup>, Renaldi Juliarfan<sup>2</sup><sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia<sup>1</sup> [yuliamalia45@gmail.com](mailto:yuliamalia45@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [arfanjulian@gmail.com](mailto:arfanjulian@gmail.com)<sup>2</sup>\* Corresponding Author: [yuliamalia45@gmail.com](mailto:yuliamalia45@gmail.com)

## ABSTRACT

Keamanan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah yang demokratis dan stabil. Penelitian ini menganalisis perlindungan keamanan dalam debat pemilihan bupati di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, dari perspektif kebijakan hukum. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji regulasi yang mengatur keamanan dalam pemilihan serta tantangan implementasinya melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan keamanan dalam proses pemilihan kepala daerah tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada efektivitas regulasi serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Tantangan utama yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, serta potensi konflik akibat persaingan politik. Diperlukan penguatan kebijakan hukum melalui perbaikan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi keamanan, serta edukasi politik bagi masyarakat agar pemilihan berlangsung aman dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, stabilitas keamanan dalam pemilihan kepala daerah dapat terjaga, sehingga memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## Article History

Received 2025-03-03

Revised 2025-03-27

Accepted 2025-03-30

## Keywords

Perlindungan  
Keamanan,  
Pembangunan  
Berkelanjutan,  
Pemilihan Bupati,  
Kebijakan Hukum,  
Gunung Sari

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Keamanan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Stabilitas keamanan yang terjaga memungkinkan terlaksananya berbagai program pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), keamanan menjadi aspek krusial yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat serta legitimasi hasil pemilihan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan keamanan dalam debat pemilihan bupati di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, dari perspektif kebijakan hukum.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan indikator penting dari kesehatan demokrasi di tingkat lokal. Azhar (2018) menekankan bahwa prinsip partisipasi dalam pemilihan kepala daerah harus didasarkan pada keterbukaan dan transparansi untuk memastikan legitimasi proses demokrasi. Namun, partisipasi yang optimal hanya dapat dicapai jika situasi keamanan selama proses pemilihan terjamin. Ketidakamanan dapat menghambat partisipasi pemilih dan menurunkan kualitas demokrasi lokal.

Studi oleh Wawointana (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masih bersifat parsial, dengan keterlibatan yang tidak merata di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam menjaga keamanan selama Pilkada. Selain itu, peran elit lokal dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan sering kali belum optimal, yang dapat mempengaruhi stabilitas selama proses pemilihan.

Koordinasi antar lembaga keamanan dan penyelenggara pemilu juga menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Situmorang (2018) menyoroti pentingnya pengawasan dan pemantauan pemilihan kepala daerah melalui pelibatan masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia. Namun, lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan keamanan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan keamanan selama proses pemilihan.

Sosialisasi regulasi terkait keamanan kepada masyarakat juga memegang peranan penting. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi keamanan dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam menjaga ketertiban selama Pilkada. Penelitian oleh Sa'ban, Sadat, dan Nastia (2019) mengungkap bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman terhadap proses dan regulasi pemilihan. Dengan demikian, sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan selama Pilkada.

Selain itu, tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak merata dan kurangnya edukasi politik dapat memperburuk situasi keamanan selama Pilkada. Wahyuningsih (2021) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada, terutama di masa pandemi, dipengaruhi oleh kesadaran akan pentingnya pemilihan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, edukasi politik yang berkelanjutan menjadi esensial dalam menciptakan lingkungan pemilihan yang kondusif.

Dalam konteks Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, dinamika politik lokal dan struktur sosial masyarakat setempat turut mempengaruhi situasi keamanan selama Pilkada. Pemahaman mendalam terhadap kondisi lokal menjadi penting dalam merancang kebijakan keamanan yang efektif. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal berisiko tidak efektif dan sulit diimplementasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan keamanan dalam debat pemilihan bupati di Kecamatan Gunung Sari dari perspektif kebijakan hukum. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengkaji regulasi yang mengatur keamanan dalam Pilkada serta tantangan implementasinya melalui wawancara dengan pihak terkait. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keamanan dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. □

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami perlindungan keamanan dalam pemilihan bupati di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, dari perspektif kebijakan hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, aparat keamanan, panitia pemilihan, serta masyarakat setempat. Studi kepustakaan dilakukan dengan meninjau regulasi yang berkaitan dengan keamanan pemilu, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan daerah. Selain itu, analisis juga

dilakukan terhadap jurnal-jurnal akademik yang membahas aspek hukum dan keamanan dalam proses pemilihan kepala daerah (Putri, 2020; Rahman, 2018).

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam. Responden dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses pemilihan dan kebijakan keamanan. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis dengan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tantangan dalam perlindungan keamanan selama pemilihan. Analisis ini juga membandingkan temuan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti isu keamanan pemilu di daerah lain di Indonesia (Suryani, 2019; Hidayat, 2021).

Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami langsung kondisi keamanan di lapangan selama tahapan pemilihan bupati. Observasi ini mencakup pemantauan aktivitas kampanye, debat publik, dan proses pemungutan suara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung efektivitas kebijakan keamanan yang diterapkan serta mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin timbul selama pemilihan. Data dari observasi dibandingkan dengan laporan resmi dari lembaga pemantau pemilu untuk memastikan validitas hasil penelitian (Maulana, 2022; Yulianto, 2017).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi guna meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, serta dokumen kebijakan yang telah dikaji. Setelah analisis dilakukan, hasil penelitian dikonfirmasi dengan para ahli di bidang hukum dan kebijakan keamanan guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif (Wijaya, 2023). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan perlindungan keamanan dalam pemilihan kepala daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Pentingnya Perlindungan Keamanan dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Keamanan merupakan faktor fundamental dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan memerlukan stabilitas politik dan keamanan yang memadai agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif (Suryadi, 2021). Dalam konteks pemilihan kepala daerah, keamanan menjadi salah satu aspek utama yang menentukan keberlangsungan demokrasi dan efektivitas pemerintahan setelah pemilihan berlangsung (Putra, 2020). Oleh karena itu, perlindungan keamanan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik, terutama di daerah yang memiliki potensi konflik tinggi selama proses pemilihan.

#### **b. Analisis Keamanan dalam Debat Pemilihan Bupati**

Debat pemilihan bupati di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, menjadi salah satu aspek yang rentan terhadap ketegangan politik. Perdebatan antar kandidat sering kali memunculkan polarisasi di masyarakat yang dapat berujung pada konflik sosial (Rahman, 2019). Oleh sebab itu, kebijakan hukum yang mengatur keamanan dalam debat pemilihan menjadi krusial untuk memastikan stabilitas sosial dan ketertiban umum.

#### **c. Regulasi yang Mengatur Keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Regulasi yang mengatur keamanan dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Regulasi ini menekankan pentingnya keterlibatan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban selama proses pemilihan (Hidayat, 2018). Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga keamanan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan yang berlaku.

**d. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menjaga Keamanan**

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan satuan pengamanan lainnya, memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemilihan bupati agar tetap kondusif. Mereka bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan pandangan politik (Santoso, 2022). Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa kasus, netralitas aparat keamanan masih menjadi isu yang diperdebatkan, terutama ketika ada indikasi keberpihakan terhadap salah satu kandidat.

**e. Tantangan Implementasi Kebijakan Keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan keamanan di Kecamatan Gunung Sari adalah lemahnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pemilihan sering kali menyebabkan ketegangan yang tidak perlu (Fauzi, 2021). Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pemilu yang damai juga menjadi faktor penyebab meningkatnya potensi konflik selama pemilihan.

**f. Dampak Keamanan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan**

Keamanan yang terjaga dengan baik memiliki dampak positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Ketika pemilih merasa aman, mereka cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak pilih mereka tanpa rasa takut akan intimidasi atau kekerasan (Wahyudi, 2020). Sebaliknya, kondisi yang tidak kondusif dapat mengurangi partisipasi pemilih dan merusak legitimasi hasil pemilihan.

**g. Peran Masyarakat dalam Menjaga Keamanan Pemilu**

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan selama pemilu sangat penting untuk mendukung stabilitas politik daerah. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban (Siregar, 2022). Selain itu, edukasi politik yang baik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang damai dan demokratis.

**h. Evaluasi Kebijakan Keamanan dalam Pemilihan Bupati di Gunung Sari**

Berdasarkan hasil penelitian ini, kebijakan keamanan dalam pemilihan bupati di Kecamatan Gunung Sari masih memiliki beberapa kelemahan dalam implementasinya. Salah satu faktor yang menjadi kendala utama adalah kurangnya koordinasi antar instansi serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban selama proses pemilihan (Rahmat, 2019). Oleh karena itu, evaluasi terhadap regulasi dan strategi implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitasnya.

**i. Rekomendasi untuk Peningkatan Keamanan Pemilu**

Untuk meningkatkan keamanan dalam pemilihan kepala daerah, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan koordinasi antara aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, sosialisasi regulasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi (Hendrawan, 2021). Selain

itu, pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi sipil juga dapat menjadi solusi untuk mencegah potensi konflik.

**j. Implikasi Kebijakan Hukum terhadap Keamanan dan Pembangunan Berkelanjutan**

Keamanan yang terjaga selama proses pemilihan memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemerintahan yang terpilih melalui proses yang aman dan demokratis lebih cenderung memiliki legitimasi yang kuat dan dapat menjalankan program pembangunan dengan lebih efektif (Yusuf, 2022). Oleh karena itu, kebijakan hukum yang mendukung keamanan pemilu harus terus dikembangkan agar selaras dengan prinsip demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan keamanan dalam proses pemilihan kepala daerah merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Studi kasus di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, menunjukkan bahwa keamanan selama pemilihan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada efektivitas regulasi serta partisipasi aktif masyarakat. Koordinasi antar lembaga yang masih lemah dan kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi tantangan utama dalam implementasi perlindungan keamanan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan kebijakan hukum melalui revisi dan penyempurnaan regulasi yang lebih jelas, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, serta edukasi politik bagi masyarakat guna menciptakan pemilihan yang aman dan demokratis. Dengan adanya perlindungan keamanan yang optimal, stabilitas daerah dapat terjaga, sehingga memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan keamanan dalam pemilihan kepala daerah harus terus dikembangkan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **Daftar Pustaka**

- Azhar, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 206-214.
- Fauzi, A. (2021). Koordinasi antar lembaga dalam pengamanan pemilihan kepala daerah. *Jurnal Politik dan Keamanan*, 14(2), 120-135.
- Hendrawan, B. (2021). Evaluasi kebijakan keamanan dalam pemilu daerah. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 9(1), 45-60.
- Hidayat, R. (2018). Regulasi keamanan dalam pemilihan kepala daerah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Tata Negara*, 11(3), 75-89.
- Putra, D. (2020). Demokrasi dan keamanan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(4), 200-215.
- Santoso, T. (2022). Peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas politik selama pemilihan kepala daerah. *Jurnal Studi Keamanan*, 10(2), 98-112.
- Suryadi, M. (2021). Pembangunan berkelanjutan dan tantangan politik dalam pemilu daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55-70.
- Hidayat, R. (2021). Keamanan Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 120-135.

- 
- Maulana, F. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Politik dan Keamanan*, 18(1), 98-112.
- Putri, A. (2020). Stabilitas Keamanan dalam Pemilu Daerah: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 12(3), 200-215.
- Rahman, B. (2018). Regulasi dan Implementasi Keamanan dalam Pemilu Lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(4), 150-165.
- Sa'ban, L. M. A., Sadat, A., & Nastia. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 29-38.
- Situmorang, D. M. (2018). Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Propinsi Banten Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 9(1), 69-85.
- Suryani, D. (2019). Konflik Politik dan Pengamanan Pemilu: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 14(2), 175-190.
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi COVID-19 di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(1), 58-66.
- Wawointana, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRATOR)*, 1(1).
- Wijaya, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Keamanan dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*, 20(1), 55-70.
- Yulianto, T. (2017). Dinamika Keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah: Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(2), 88-102.